TRADISI
Terapan Administrasi dan Aksi Pemberdayaan Inklusif
Kolaboratif | Transformatif | Inklusif & Berkelanjutan

PENDAMPINGAN NIB, PIRT, DAN PEMASARAN BERBASIS ABCD UNTUK MENINGKATKAN DAYA SAING UMKM DI RW 03 SIDOSERMO SURABAYA

M. Multazami [1], Revarina Putri Auliya [2*], Tantri Arnindhita Amelia Subakri [3], Alya Diva Alfitrah [4], Nico Dwi Prasetya [5], Arif Ainur Rofiq [6]
e-mail: 04020323055@uinsa.ac.id

[1-6] Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, Indonesia

ABSTRAK

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam perekonomian masyarakat, tetapi pelaku usaha masih menghadapi kendala dalam pemenuhan legalitas dan pemasaran produk. Kegiatan pengabdian ini bertujuan mendampingi pelaku UMKM di RW 03 Kelurahan Sidosermo, Surabaya, dalam pengurusan legalitas usaha berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Perizinan Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), serta penguatan pemasaran produk melalui pendekatan *Asset-Based Community Development* (ABCD). Kegiatan dilaksanakan melalui tahapan *discovery, dream, design,* dan *destiny* dengan melibatkan 16 pelaku UMKM, pengurus RW dan RT, Karang Taruna RW 03, serta Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Kota Surabaya. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa 14 pelaku UMKM difasilitasi dalam proses pendaftaran NIB, sedangkan 10 pelaku UMKM masih dalam proses penyelesaian berkas PIRT. Pada aspek pemasaran, kegiatan menghasilkan akun media sosial bersama bernama "UMKM Sidosermo RW 03" di Instagram dan TikTok yang dikelola oleh Karang Taruna. Capaian tersebut menunjukkan terlaksananya fasilitasi legalitas usaha dan pembentukan sarana promosi kolektif. Namun, perubahan omzet, jangkauan pasar, dan tingkat pengetahuan peserta belum diukur secara kuantitatif sehingga dampak ekonomi program belum dapat disimpulkan. Keberlanjutan program memerlukan pendampingan lanjutan dalam penyelesaian PIRT serta pengelolaan media sosial secara terjadwal oleh komunitas.

Kata Kunci : UMKM; legalitas usaha; NIB; PIRT; pemasaran digital

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung perekonomian nasional karena memiliki kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta pemerataan kesejahteraan masyarakat (Roudhotun et al., 2024). UMKM merupakan salah satu sektor dominan yang menyumbang sekitar 60,5% hingga 61% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dan menyerap hingga 97% dari total tenaga kerja nasional. Dengan jumlah unit usaha mencapai lebih dari 65 juta atau hampir 99% dari seluruh unit usaha di Indonesia, UMKM tersebar di berbagai wilayah, baik perkotaan maupun pedesaan (Darmawan, 2026). Kondisi tersebut

TRADISI
e-ISSN: 3164 - 8037

How to Cite:
Multazami, M., Auliya, R. P., Subakri, T. A. A., Alfitrah, A. D., Prasetya, N. D., & Rofiq, A. A. (2026). Pendampingan NIB, PIRT, dan pemasaran berbasis ABCD untuk meningkatkan daya saing UMKM di RW 03 Sidosermo Surabaya. *TRADISI: Terapan Administrasi dan Aksi Pemberdayaan Inklusif, 1*(2), 25–40.

menunjukkan bahwa UMKM memiliki posisi strategis dalam menopang stabilitas dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Tidak hanya berperan sebagai penyerap tenaga kerja, UMKM juga menjadi instrumen penting dalam pembangunan ekonomi berbasis masyarakat karena mampu mendorong peningkatan pendapatan rumah tangga dan memperkuat ekonomi lokal. Oleh karena itu, pengembangan kapasitas UMKM menjadi salah satu agenda penting dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Meskipun memiliki peran strategis, sebagian UMKM masih menghadapi berbagai kendala yang menghambat pengembangan usaha. Salah satu permasalahan yang dihadapi adalah rendahnya kepemilikan legalitas usaha, khususnya Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Perizinan Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT). Legalitas usaha merupakan instrumen yang memberikan kepastian hukum dan perlindungan usaha, sekaligus membuka akses terhadap berbagai program pemerintah, termasuk pembiayaan, pelatihan, kemitraan, dan perluasan pasar. Namun, masih banyak pelaku UMKM yang belum memahami pentingnya legalitas usaha maupun prosedur pengurusannya sehingga pemenuhan persyaratan administratif dan peluang pengembangan usaha menjadi terkendala (Nadapdap dan Jamaluddin, 2026).

Selain aspek legalitas, tantangan lain yang dihadapi UMKM adalah keterbatasan kapasitas pemasaran produk. Perkembangan teknologi informasi dan transformasi digital telah mengubah pola konsumsi masyarakat yang semakin memanfaatkan platform digital untuk memperoleh informasi maupun melakukan transaksi ekonomi. Kondisi tersebut menuntut UMKM untuk mengembangkan strategi pemasaran yang adaptif, inovatif, dan berbasis teknologi. Akan tetapi, sebagian pelaku UMKM masih mengandalkan pemasaran konvensional dengan jangkauan pasar yang terbatas sehingga produk yang dihasilkan belum dapat menjangkau pasar secara optimal. Penguatan pemasaran, baik secara langsung maupun melalui media digital, menjadi faktor penting dalam meningkatkan visibilitas produk, memperluas akses pasar, dan memperkuat posisi kompetitif UMKM di tengah persaingan usaha yang semakin kompleks (Hakim et al., 2024).

Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, pendekatan *Asset-Based Community Development* (ABCD) menawarkan paradigma pembangunan yang berorientasi pada penguatan aset dan potensi lokal yang dimiliki komunitas. Pendekatan ini memandang masyarakat sebagai subjek pembangunan yang memiliki berbagai sumber daya, baik sumber daya manusia, sosial, ekonomi, maupun kelembagaan, yang dapat dimobilisasi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi. Berbeda dengan pendekatan berbasis kebutuhan (*needs-based approach*), ABCD menekankan proses identifikasi, mobilisasi, dan optimalisasi aset komunitas sebagai fondasi dalam mendorong perubahan sosial yang berkelanjutan. Oleh karena itu, penerapan pendekatan ABCD dalam pendampingan UMKM relevan untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat sekaligus mengoptimalkan potensi komunitas dalam mendukung pengembangan usaha (Ubaidillah et al., 2025).

TRADISI
e-ISSN: 3164 - 8037

How to Cite:
Multazami, M., Auliya, R. P., Subakri, T. A. A., Alfitrah, A. D., Prasetya, N. D., & Rofiq, A. A. (2026). Pendampingan NIB, PIRT, dan pemasaran berbasis ABCD untuk meningkatkan daya saing UMKM di RW 03 Sidosermo Surabaya. *TRADISI: Terapan Administrasi dan Aksi Pemberdayaan Inklusif, 1*(2), 25–40.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas pendampingan legalitas usaha dan penguatan pemasaran sebagai upaya mendukung pengembangan UMKM. Kaplele et al. (2026) menunjukkan bahwa edukasi dan pendampingan terkait NIB, PIRT, serta sertifikasi halal dapat meningkatkan kesadaran hukum dan kesiapan UMKM dalam memenuhi aspek legalitas usaha. Firmansyah et al. (2025) membahas pendampingan legalitas usaha yang dipadukan dengan *digital marketing* untuk mendukung visibilitas usaha dan keterampilan digital pelaku UMKM. Sementara itu, Fatimah et al. (2025) mengkaji strategi pemasaran yang didukung penguatan legalitas usaha berupa NIB, PIRT, dan sertifikasi halal dalam upaya memperluas akses pasar dan mendukung daya saing UMKM. Berbagai kajian tersebut menjadi landasan bagi pelaksanaan kegiatan pengabdian yang mengintegrasikan pendampingan legalitas usaha dan penguatan pemasaran melalui pendekatan ABCD. Kegiatan ini menempatkan aset dan partisipasi komunitas sebagai bagian penting dalam proses pendampingan UMKM.

RW 03 Kelurahan Sidosermo, Kota Surabaya, merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi UMKM cukup beragam. Namun, masih terdapat pelaku usaha yang menghadapi kendala dalam aspek legalitas usaha dan pengembangan pemasaran produk. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya program pendampingan yang tidak hanya berorientasi pada pemenuhan persyaratan administratif, tetapi juga pada penguatan kapasitas usaha melalui optimalisasi aset yang dimiliki masyarakat. Berdasarkan latar belakang tersebut, kegiatan pengabdian ini dilaksanakan untuk mendeskripsikan proses pendampingan legalitas usaha berupa NIB dan PIRT serta penguatan pemasaran produk berbasis ABCD bagi UMKM di RW 03 Sidosermo, Kota Surabaya. Kegiatan ini juga menguraikan hasil pendampingan dan kontribusi pendekatan ABCD dalam mengoptimalkan aset komunitas untuk mendukung pengembangan dan daya saing UMKM.

TINJAUAN PUSTAKA

UMKM dan Perannya dalam Perekonomian

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dipandang sebagai tulang punggung perekonomian nasional karena kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat (Roudhotun et al., 2024). Darmawan (2026) memaparkan bahwa UMKM menyumbang sekitar 60,5% hingga 61% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dan menyerap hingga 97% tenaga kerja nasional. Jumlah unit usahanya melampaui 65 juta atau hampir 99% dari seluruh unit usaha. UMKM juga tersebar di wilayah perkotaan maupun pedesaan sehingga berperan dalam pemerataan pendapatan dan pengurangan kesenjangan antarwilayah.

Berdasarkan kajian tersebut, UMKM tidak hanya berfungsi sebagai penyerap tenaga kerja, tetapi juga sebagai salah satu instrumen pembangunan ekonomi berbasis masyarakat yang dapat meningkatkan pendapatan rumah tangga dan memperkuat ekonomi lokal. Oleh karena itu,

TRADISI
e-ISSN: 3164 - 8037
How to Cite:
Multazami, M., Auliya, R. P., Subakri, T. A. A., Alfitrah, A. D., Prasetya, N. D., & Rofiq, A. A. (2026). Pendampingan NIB, PIRT, dan pemasaran berbasis ABCD untuk meningkatkan daya saing UMKM di RW 03 Sidosermo Surabaya. *TRADISI: Terapan Administrasi dan Aksi Pemberdayaan Inklusif, 1*(2), 25–40.

pengembangan kapasitas UMKM menjadi salah satu agenda penting dalam mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Legalitas Usaha: NIB dan PIRT

Legalitas usaha memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pelaku usaha, sekaligus membuka akses terhadap berbagai program pemerintah, seperti pembiayaan, pelatihan, kemitraan, dan perluasan pasar. Dua instrumen legalitas yang relevan bagi pelaku usaha, khususnya usaha pangan skala rumahan, adalah Nomor Induk Berusaha (NIB), yang pendaftarannya dilakukan melalui sistem *Online Single Submission* (OSS), dan Perizinan Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT). Kepemilikan dokumen legalitas tersebut dapat memberikan kepastian hukum, memfasilitasi akses pasar, serta memperkuat kepercayaan konsumen terhadap produk (Saputra et al., 2025).

Nadapdap dan Jamaluddin (2026) menunjukkan bahwa rendahnya kepemilikan NIB dan PIRT merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi UMKM. Banyak pelaku usaha belum memahami urgensi dan prosedur pengurusannya sehingga pemenuhan persyaratan administratif masih menjadi kendala dalam pengembangan usaha. Puspaningrum dan Widiastuti (2025) menambahkan bahwa pelaku usaha mikro cenderung menganggap proses pengurusan legalitas sulit dan mahal, padahal legalitas usaha, produk, dan kemasan dapat memberikan perlindungan serta mendukung keberlanjutan usaha. Jeremi et al. (2025) juga menegaskan bahwa ketiadaan NIB dan PIRT dapat menjadi hambatan bagi UMKM dalam mengakses pasar formal, fasilitas pembiayaan, dan program pendampingan pemerintah.

Sejumlah studi membahas pentingnya pendampingan legalitas bagi UMKM. Kaplele et al. (2026) menemukan bahwa edukasi mengenai NIB, PIRT, dan sertifikasi halal dapat meningkatkan kesadaran hukum serta kesiapan UMKM dalam memenuhi aspek legalitas. Jeremi et al. (2025) melaporkan bahwa pendampingan legalitas yang terstruktur dan kontekstual dengan pendekatan *Asset-Based Community Development* (ABCD) dapat mendorong UMKM untuk berkembang dan memperluas akses ke ekosistem usaha formal. Saputra et al. (2025) juga membahas pemberdayaan UMKM melalui fasilitasi NIB, PIRT, dan sertifikat halal di tingkat desa.

Pemasaran Produk dan Pemasaran Digital

Selain legalitas, kapasitas pemasaran merupakan salah satu faktor yang mendukung daya saing UMKM. Perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola konsumsi masyarakat yang semakin memanfaatkan platform digital. Kondisi tersebut mendorong UMKM untuk mengembangkan strategi pemasaran yang adaptif, inovatif, dan berbasis teknologi. Namun, sebagian pelaku usaha masih mengandalkan pemasaran konvensional dengan jangkauan pasar yang terbatas. Penguatan pemasaran, baik secara langsung maupun digital, berperan penting dalam meningkatkan visibilitas produk, memperluas akses pasar, dan memperkuat posisi kompetitif UMKM (Hakim et al., 2024).

TRADISI
e-ISSN: 3164 - 8037

How to Cite:
Multazami, M., Auliya, R. P., Subakri, T. A. A., Alfitrah, A. D., Prasetya, N. D., & Rofiq, A. A. (2026). Pendampingan NIB, PIRT, dan pemasaran berbasis ABCD untuk meningkatkan daya saing UMKM di RW 03 Sidosermo Surabaya. *TRADISI: Terapan Administrasi dan Aksi Pemberdayaan Inklusif, 1*(2), 25–40.

Pada tataran praktik, Rahmadany et al. (2025) menemukan bahwa konten visual berupa foto dan video produk yang jelas, menarik, dan informatif dapat meningkatkan minat beli. Konsistensi unggahan dan kemasan yang menarik juga menjadi faktor yang perlu diperhatikan dalam mendorong pembelian ulang. Sementara itu, Puspitasari et al. (2025) menunjukkan bahwa pendampingan UMKM yang memadukan aspek legalitas, *branding*, dan pemasaran berkontribusi dalam mendukung pengembangan ekonomi masyarakat.

Pendekatan *Asset-Based Community Development* (ABCD)

ABCD dikembangkan oleh John P. Kretzmann dan John L. McKnight dengan menekankan identifikasi, pemetaan, serta optimalisasi aset komunitas sebagai dasar pelaksanaan program pemberdayaan (Wajdi et al., 2024). Berbeda dengan pendekatan berbasis kebutuhan (*needs-based approach*) yang berangkat dari identifikasi masalah, ABCD memandang masyarakat sebagai subjek pembangunan yang memiliki sumber daya manusia, sosial, ekonomi, dan kelembagaan yang dapat dimobilisasi (Ubaidillah et al., 2025). Dengan demikian, pendekatan ini menempatkan kekuatan dan potensi masyarakat sebagai titik awal penyusunan program pemberdayaan, bukan semata-mata berfokus pada permasalahan yang dihadapi (Susilawaty et al., 2018).

Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini mengacu pada empat tahapan ABCD, yaitu *discovery*, *dream*, *design*, dan *destiny*. Tahap *discovery* dilakukan melalui observasi dan wawancara untuk mengidentifikasi aset, potensi, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat. Selanjutnya, tahap *dream* dilakukan melalui diskusi bersama warga untuk merumuskan harapan dan kemungkinan solusi berdasarkan aset yang dimiliki. Pada tahap *design*, program sosialisasi dan pendampingan disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan serta aset yang tersedia. Tahap terakhir, yaitu *destiny*, merupakan pelaksanaan program melalui kegiatan sosialisasi, *Focus Group Discussion* (FGD), dan pendampingan langsung.

Penerapan ABCD dalam pemberdayaan UMKM telah dibahas dalam sejumlah kegiatan terdahulu. Abas et al. (2024) menerapkan ABCD untuk menguatkan potensi lokal dalam pengembangan UMKM kerupuk di Kuningan, Jawa Barat. Asbara et al. (2025) mengkaji penerapan ABCD dalam transformasi UMKM dan melaporkan bahwa pemanfaatan aset komunitas dapat mendorong pemberdayaan yang partisipatif serta mendukung pengembangan kapasitas manajerial dan kepercayaan diri pelaku usaha. Ubaidillah et al. (2025) juga menilai ABCD relevan dalam pendampingan UMKM karena mendorong partisipasi aktif masyarakat sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi komunitas.

Peran Karang Taruna dan Generasi Muda sebagai Aset Komunitas

Dalam kerangka ABCD, organisasi kepemudaan dapat menjadi salah satu aset sumber daya manusia yang strategis dalam pemberdayaan masyarakat. Fatwa dan Rasid (2023) menunjukkan bahwa Karang Taruna berperan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pendampingan

TRADISI
e-ISSN: 3164 - 8037
How to Cite:
Multazami, M., Auliya, R. P., Subakri, T. A. A., Alfitrah, A. D., Prasetya, N. D., & Rofiq, A. A. (2026). Pendampingan NIB, PIRT, dan pemasaran berbasis ABCD untuk meningkatkan daya saing UMKM di RW 03 Sidosermo Surabaya. *TRADISI: Terapan Administrasi dan Aksi Pemberdayaan Inklusif, 1*(2), 25–40.

UMKM berbasis teknologi digital. Purwito et al. (2024) menegaskan bahwa generasi muda berperan penting dalam transformasi digital UMKM melalui penguasaan teknologi informasi dan kreativitas dalam pemasaran. Ainiyah et al. (2026) juga membahas pendampingan digitalisasi produk UMKM yang menempatkan kapasitas digital komunitas sebagai salah satu faktor pendukung pelaksanaan program.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan *Asset-Based Community Development* (ABCD) yang dikembangkan oleh John P. Kretzmann dan John L. McKnight (Wajdi et al., 2024). Pendekatan ini menekankan identifikasi, pemetaan, dan optimalisasi aset yang dimiliki masyarakat sebagai dasar penyusunan program pemberdayaan. Dalam kegiatan ini, aset yang dimaksud meliputi potensi pelaku UMKM, dukungan pengurus RW dan RT, keterlibatan Karang Taruna, serta kolaborasi dengan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Kota Surabaya. Melalui pendekatan tersebut, masyarakat diposisikan sebagai subjek yang berperan aktif dalam upaya mengembangkan potensi dan mengatasi permasalahan yang dihadapi. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui empat tahapan utama ABCD, yaitu *discovery*, *dream*, *design*, dan *destiny*.

1. ***Discovery***
   Tahap *discovery* dilakukan melalui observasi lapangan dan wawancara dengan pengurus RW, delapan Ketua RT, serta pelaku UMKM di RW 03 Kelurahan Sidosermo, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya. Kegiatan ini bertujuan mengidentifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi pelaku UMKM. Hasil identifikasi menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM belum memiliki legalitas usaha berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Perizinan Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), serta masih menghadapi kendala dalam pemasaran produk.
2. ***Dream***
   Tahap *dream* dilaksanakan melalui diskusi bersama pengurus RW, tokoh masyarakat, dan pelaku UMKM untuk merumuskan harapan serta solusi atas permasalahan yang dihadapi. Hasil diskusi menunjukkan bahwa pengembangan UMKM difokuskan pada pendampingan legalitas usaha dan penguatan pemasaran produk. Selain itu, diidentifikasi pula aset komunitas yang dapat mendukung pelaksanaan program, seperti dukungan pengurus RW, Karang Taruna yang memiliki literasi digital, serta kemitraan dengan instansi pemerintah.
3. ***Design***
   Pada tahap *design*, tim pengabdian menyusun program sosialisasi dan pendampingan berdasarkan kebutuhan masyarakat. Tim berkolaborasi dengan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Kota Surabaya untuk memberikan materi mengenai legalitas usaha, pendaftaran NIB melalui sistem *Online Single Submission* (OSS), dan pengurusan PIRT. Selanjutnya, mahasiswa bersama Karang Taruna merancang kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) mengenai strategi pemasaran produk yang meliputi *branding*, desain kemasan, pemanfaatan media sosial, dan pemasaran digital.

TRADISI
e-ISSN: 3164 - 8037

How to Cite:
Multazami, M., Auliya, R. P., Subakri, T. A. A., Alfitrah, A. D., Prasetya, N. D., & Rofiq, A. A. (2026). Pendampingan NIB, PIRT, dan pemasaran berbasis ABCD untuk meningkatkan daya saing UMKM di RW 03 Sidosermo Surabaya. *TRADISI: Terapan Administrasi dan Aksi Pemberdayaan Inklusif, 1*(2), 25–40.

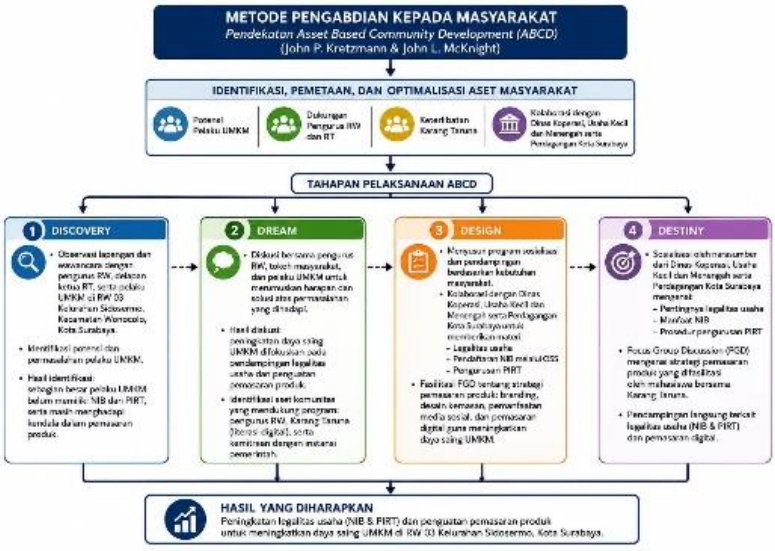
4. *Destiny*

Tahap *destiny* dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi, FGD, dan pendampingan langsung. Sosialisasi diawali dengan penyampaian materi mengenai pentingnya legalitas usaha, manfaat NIB, serta prosedur pengurusan PIRT oleh narasumber dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Kota Surabaya. Kegiatan dilanjutkan dengan FGD mengenai strategi pemasaran produk yang difasilitasi oleh mahasiswa bersama Karang Taruna sebagai bentuk optimalisasi aset sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang teknologi digital. Dalam kegiatan ini, peserta berdiskusi mengenai strategi *branding*, desain kemasan, pemanfaatan media sosial, dan pemasaran digital untuk mendukung pengembangan pemasaran produk UMKM.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Identifikasi Aset dan Potensi UMKM Berbasis ABCD di RW 03 Sidosermo Surabaya

Tahap awal kegiatan pengabdian dilakukan melalui identifikasi aset (*asset mapping*) sebagai implementasi pendekatan *Asset-Based Community Development* (ABCD). Kegiatan diawali dengan observasi dan silaturahmi kepada Ketua RW 03 serta delapan Ketua RT di RW 03 Sidosermo Surabaya. Selanjutnya, wawancara dilakukan untuk menggali potensi wilayah, kondisi UMKM, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat. Melalui tahapan ini, diperoleh informasi mengenai aset sosial, aset ekonomi, dan aset fisik yang menjadi dasar penyusunan program pendampingan. Pendekatan ABCD menekankan bahwa pemberdayaan masyarakat diawali dengan mengidentifikasi dan memetakan aset yang telah dimiliki komunitas. Dengan demikian, program yang dirancang berorientasi pada kekuatan masyarakat, bukan semata-mata pada permasalahan yang dihadapi (Susilawaty et al., 2018).



Gambar 1. Bagan Alur Metode ABCD

TRADISI
e-ISSN: 3164 - 8037

How to Cite:
Multazami, M., Auliya, R. P., Subakri, T. A. A., Alfitrah, A. D., Prasetya, N. D., & Rofiq, A. A. (2026). Pendampingan NIB, PIRT, dan pemasaran berbasis ABCD untuk meningkatkan daya saing UMKM di RW 03 Sidosermo Surabaya. *TRADISI: Terapan Administrasi dan Aksi Pemberdayaan Inklusif*, *1*(2), 25–40.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua RW, Bapak Mat Tolchi Wibowo, dan para Ketua RT, diketahui bahwa mayoritas masyarakat RW 03 menggantungkan aktivitas ekonominya pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Jenis usaha yang dijalankan cukup beragam, antara lain usaha kue kering, kue basah, nasi goreng, bakso, bubur, serta berbagai usaha kuliner rumahan lainnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa RW 03 memiliki potensi ekonomi lokal yang dapat dikembangkan. Selain memiliki lokasi yang strategis, masyarakat juga menunjukkan antusiasme terhadap upaya pengembangan usaha. Antusiasme dan dukungan tersebut menjadi modal sosial yang penting dalam pelaksanaan program pemberdayaan berbasis ABCD (Abas et al., 2024).



Gambar 2. Wawancara dengan Ketua RW 03

Meskipun memiliki potensi usaha yang cukup besar, hasil identifikasi menunjukkan bahwa pelaku UMKM masih menghadapi beberapa kendala. Salah satu temuan diperoleh dari wawancara dengan Ketua RT 03, Bapak Ribut Santoso, yang menyampaikan bahwa sebagian besar pelaku UMKM belum memiliki legalitas usaha berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) dan belum mengurus Perizinan Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT). Berdasarkan hasil pendataan, sekitar lima pelaku UMKM telah memiliki NIB, sedangkan sebagian besar lainnya belum mengurus legalitas tersebut. Selain itu, seluruh UMKM yang terdata belum memiliki PIRT. Kendala lainnya adalah terbatasnya kegiatan promosi dan pemasaran produk sehingga jangkauan pasar belum berkembang secara optimal.



Gambar 3. Wawancara dengan Ketua RT 03

TRADISI
e-ISSN: 3164 - 8037

How to Cite:
Multazami, M., Auliya, R. P., Subakri, T. A. A., Alfitrah, A. D., Prasetya, N. D., & Rofiq, A. A. (2026). Pendampingan NIB, PIRT, dan pemasaran berbasis ABCD untuk meningkatkan daya saing UMKM di RW 03 Sidosermo Surabaya. *TRADISI: Terapan Administrasi dan Aksi Pemberdayaan Inklusif, 1*(2), 25–40.

Hasil pemetaan aset juga menunjukkan adanya berbagai sumber daya yang dapat dioptimalkan untuk mendukung program pendampingan. Aset sosial meliputi dukungan Ketua RW, Ketua RT, Karang Taruna, kelompok UMKM, serta partisipasi masyarakat dalam kegiatan. Sementara itu, aset fisik yang dimiliki berupa balai RW dan pendopo kelurahan yang dapat dimanfaatkan sebagai lokasi sosialisasi dan pendampingan. Berdasarkan hasil identifikasi tersebut, disusun program pendampingan yang berfokus pada penguatan legalitas usaha melalui fasilitasi pengurusan NIB dan PIRT serta penguatan pemasaran produk. Program ini dirancang dengan memanfaatkan aset yang dimiliki masyarakat agar pelaksanaan pemberdayaan UMKM dapat berlangsung secara partisipatif dan berkelanjutan (Asbara et al., 2025).

Pendampingan Legalitas Usaha melalui Pengurusan NIB dan PIRT bagi UMKM

Berdasarkan hasil identifikasi aset dan permasalahan, legalitas usaha menjadi salah satu kendala yang dihadapi oleh pelaku UMKM di RW 03 Sidosermo. Berdasarkan daftar hadir kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh tim KKN Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, tercatat sebanyak 16 pelaku UMKM hadir dan mendaftarkan diri untuk mengikuti program pendampingan. Jenis usaha yang dijalankan cukup beragam, meliputi usaha kuliner seperti nasi pecel, kue basah, Cireng Gemoy, donat dan gorengan, sempol, risol, dimsum, hingga soto ayam. Keberagaman tersebut menunjukkan adanya potensi ekonomi lokal di bidang kuliner rumahan. Namun, berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua RT dan pelaku usaha, masih terdapat peserta yang belum memiliki legalitas usaha berupa NIB maupun PIRT sehingga memerlukan pendampingan dalam proses pengurusannya.

Kepemilikan dokumen legalitas usaha seperti NIB dan PIRT dapat membantu UMKM mengakses pasar formal, fasilitas pembiayaan, serta program pendampingan pemerintah (Jeremi et al., 2025). Pendampingan legalitas usaha dengan pendekatan *Asset-Based Community Development* (ABCD) dapat menjadi salah satu upaya untuk mendorong UMKM memasuki ekosistem usaha formal. Sejumlah pelaku usaha mikro belum memenuhi persyaratan legalitas karena menganggap proses pengurusannya sulit dan mahal. Padahal, legalitas usaha dan produk dapat memberikan perlindungan serta mendukung keberlanjutan usaha (Puspaningrum & Widiastuti, 2025).

Pada tahap *design* dan *destiny*, mahasiswa merancang dan melaksanakan program pendampingan legalitas usaha melalui kegiatan sosialisasi dan fasilitasi teknis. Sosialisasi dilaksanakan dengan menghadirkan narasumber dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan (Dinkop UKM dan Perdagangan) Kota Surabaya. Narasumber memberikan penjelasan mengenai pentingnya legalitas usaha, prosedur pendaftaran NIB melalui sistem *Online Single Submission* (OSS), serta tata cara pengurusan PIRT. Kegiatan ini sejalan dengan upaya Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dalam

TRADISI
e-ISSN: 3164 - 8037
How to Cite:
Multazami, M., Auliya, R. P., Subakri, T. A. A., Alfitrah, A. D., Prasetya, N. D., & Rofiq, A. A. (2026). Pendampingan NIB, PIRT, dan pemasaran berbasis ABCD untuk meningkatkan daya saing UMKM di RW 03 Sidosermo Surabaya. *TRADISI: Terapan Administrasi dan Aksi Pemberdayaan Inklusif, 1*(2), 25–40.

menyosialisasikan pengurusan PIRT dan NIB kepada pelaku UMKM di berbagai kecamatan di Surabaya, termasuk Wonocolo.

Materi sosialisasi mencakup persyaratan teknis, tahapan pendaftaran, serta manfaat kepemilikan legalitas usaha, seperti perlindungan hukum, kemudahan akses pembiayaan, dan peluang mengikuti tender atau menjalin kemitraan dengan usaha besar. Legalitas usaha seperti NIB dan PIRT juga berperan dalam memberikan kepastian hukum, memfasilitasi akses pasar, serta memperkuat kepercayaan konsumen terhadap produk (Saputra et al., 2025).

Selanjutnya, Bapak Khafid Basri memberikan pendampingan teknis secara langsung kepada pelaku UMKM yang hadir. Pendampingan meliputi bantuan administrasi dalam pengisian data pada sistem OSS untuk pendaftaran NIB serta asistensi penyiapan dokumen yang diperlukan dalam pengajuan PIRT, seperti formulir permohonan, denah lokasi usaha, daftar bahan baku, dan prosedur keamanan pangan. Proses pendampingan dilakukan secara individu maupun kelompok sesuai dengan tingkat kesiapan masing-masing pelaku usaha. Bagi pelaku UMKM yang mengalami kesulitan mengakses sistem daring, tim pendamping memberikan bantuan teknis dengan memanfaatkan perangkat yang tersedia.



Gambar 4. Pendampingan Pengurusan NIB dan PIRT bagi UMKM

Hasil program pendampingan menunjukkan bahwa dari 16 pelaku UMKM yang mengikuti sosialisasi, sebanyak 14 pelaku usaha telah difasilitasi dalam proses pendaftaran NIB. Sementara itu, 10 pelaku UMKM sedang dalam proses melengkapi berkas untuk pengurusan PIRT. Pelaku usaha yang mengikuti fasilitasi pendaftaran NIB antara lain bergerak di bidang nasi pecel, kue basah, Cireng Gemoy, donat dan gorengan, sempol, risol, dimsum, serta soto ayam. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pendampingan berbasis ABCD telah memfasilitasi pelaku UMKM dalam memulai proses pengurusan legalitas usaha. Pelaksanaan program ini juga didukung oleh peran aktif Karang Taruna dan pengurus RW dalam mendorong partisipasi masyarakat (Asbara et al., 2025).

TRADISI
e-ISSN: 3164 - 8037

How to Cite:
Multazami, M., Auliya, R. P., Subakri, T. A. A., Alfitrah, A. D., Prasetya, N. D., & Rofiq, A. A. (2026). Pendampingan NIB, PIRT, dan pemasaran berbasis ABCD untuk meningkatkan daya saing UMKM di RW 03 Sidosermo Surabaya. *TRADISI: Terapan Administrasi dan Aksi Pemberdayaan Inklusif, 1*(2), 25–40.

Tabel 1. Data Pelaku UMKM Peserta Sosialisasi Pendampingan di RW 03 Sidosermo Surabaya

No.	Nama	Jenis Usaha
1	Ruri N. Aini	F&B
2	Sukartini	Nasi Pecel
3	Su'udah	Kue Basah
4	Abdul Gani	Cireng Gemoy
5	Lia	Roti Goreng
6	Dian Wilda	Donat & Gorengan
7	Mike Indriana	Sempol, Catering
8	Dinar	Soto Ayam
9	Rahayu	Risol
10	Tri Purwaningsih	Dimsum, Ceker/Kepala Ayam
11	Samali	Nasi Pecel
12	Diah Arum	Tahu Bakso
13	Aprilia	Dimsum
14	Rina	Kue Kering, Kue Basah
15	Dewi Astutik	Nasi Tumpeng
16	Dyah	Taso & Peyek

Dengan demikian, pendampingan legalitas usaha berbasis ABCD yang mengoptimalkan aset komunitas, seperti pengurus RW dan Karang Taruna, serta kolaborasi dengan dinas terkait, telah mendukung partisipasi pelaku UMKM dalam proses pengurusan legalitas usaha. Legalitas usaha merupakan salah satu fondasi bagi UMKM untuk mengembangkan usaha, memperluas akses pasar, dan meningkatkan daya saing di tengah persaingan usaha (Jeremi et al., 2025; Puspaningrum & Widiastuti, 2025).

Penguatan Pemasaran Produk untuk Mendukung Daya Saing UMKM

Selain aspek legalitas, penguatan pemasaran produk menjadi fokus kedua dalam program pendampingan UMKM di RW 03 Sidosermo. Berdasarkan hasil diskusi pada tahap *dream*, pelaku UMKM menyampaikan bahwa strategi pemasaran yang masih konvensional menjadi salah satu kendala dalam meningkatkan omzet dan memperluas pangsa pasar. Mayoritas usaha mengandalkan penjualan melalui pesanan langsung, tetangga, atau kerabat tanpa promosi yang sistematis maupun pemanfaatan platform digital. Kondisi ini menyebabkan produk-produk kuliner unggulan RW 03 belum banyak dikenal oleh konsumen di luar wilayah setempat.

TRADISI
e-ISSN: 3164 - 8037

How to Cite:
Multazami, M., Auliya, R. P., Subakri, T. A. A., Alfitrah, A. D., Prasetya, N. D., & Rofiq, A. A. (2026). Pendampingan NIB, PIRT, dan pemasaran berbasis ABCD untuk meningkatkan daya saing UMKM di RW 03 Sidosermo Surabaya. *TRADISI: Terapan Administrasi dan Aksi Pemberdayaan Inklusif, 1*(2), 25–40.

Merujuk pada hasil identifikasi aset pada tahap *discovery*, mahasiswa memetakan potensi sumber daya manusia yang dimiliki komunitas, terutama Karang Taruna RW 03 yang memiliki literasi digital dan kemampuan teknis di bidang media sosial serta desain grafis. Kolaborasi antara mahasiswa KKN, Karang Taruna, dan pelaku UMKM menjadi dasar pelaksanaan program penguatan pemasaran produk. Hal ini sejalan dengan kajian yang menunjukkan bahwa Karang Taruna sebagai organisasi kepemudaan memiliki peran strategis dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pendampingan UMKM berbasis teknologi digital (Fatwa & Rasid, 2023).

Pada tahap *design*, disusun program *Focus Group Discussion* (FGD) dan pelatihan pemasaran yang mencakup empat komponen strategi, yaitu: (1) *branding* atau penciptaan identitas usaha; (2) desain kemasan produk; (3) pemanfaatan media sosial sebagai sarana promosi; dan (4) pemasaran digital melalui *marketplace*. Strategi tersebut sejalan dengan kegiatan pendampingan UMKM yang mengintegrasikan aspek legalitas, *branding*, dan pemasaran sebagai upaya mendukung pengembangan usaha (Puspitasari et al., 2025).

Pelaksanaan program pada tahap *destiny* diawali dengan FGD yang membahas pentingnya *branding* bagi UMKM. Dalam sesi ini, mahasiswa KKN bersama Karang Taruna memfasilitasi peserta untuk mendiskusikan nama usaha, logo, dan cerita merek yang dapat membedakan produk mereka dari produk sejenis. Materi berikutnya adalah pelatihan desain kemasan yang menekankan aspek estetika, keamanan pangan, dan daya tarik visual. Mahasiswa dan Karang Taruna mendampingi pelaku UMKM dalam membuat desain kemasan sederhana menggunakan aplikasi desain grafis seperti Canva, serta memberikan rekomendasi bahan kemasan yang ekonomis dan ramah lingkungan.



Gambar 5. Pendampingan Pemasaran Produk UMKM

Pada sesi pemasaran digital, pelaku UMKM diberikan pelatihan praktis mengenai cara memfoto produk menggunakan *smartphone*, menulis deskripsi produk, mengunggah konten di media sosial seperti Instagram, TikTok, dan WhatsApp Business, serta memanfaatkan *marketplace* seperti Shopee untuk menjangkau konsumen yang lebih luas. Pemasaran digital melalui media sosial dan *content*

TRADISI
e-ISSN: 3164 - 8037

How to Cite:
Multazami, M., Auliya, R. P., Subakri, T. A. A., Alfitrah, A. D., Prasetya, N. D., & Rofiq, A. A. (2026). Pendampingan NIB, PIRT, dan pemasaran berbasis ABCD untuk meningkatkan daya saing UMKM di RW 03 Sidosermo Surabaya. *TRADISI: Terapan Administrasi dan Aksi Pemberdayaan Inklusif, 1*(2), 25–40.

marketing dapat mendukung peningkatan visibilitas produk. Penelitian lain juga menemukan bahwa konten visual berupa foto dan video produk yang jelas, menarik, dan informatif dapat meningkatkan minat beli konsumen. Selain itu, konsistensi unggahan konten dan kemasan yang menarik menjadi faktor yang dapat mendorong pembelian ulang (Rahmadany et al., 2025). Peran mahasiswa KKN dan Karang Taruna dalam pendampingan ini sejalan dengan temuan bahwa generasi muda dapat mendorong transformasi digital UMKM melalui penguasaan teknologi informasi dan kreativitas dalam pemasaran (Purwito et al., 2024).

Hasil program penguatan pemasaran menunjukkan adanya upaya pengembangan promosi produk secara kolektif melalui media sosial. Dalam kegiatan ini, berhasil dibuat akun bersama bernama "UMKM Sidosermo RW 03" pada platform Instagram dan TikTok yang dikelola oleh Karang Taruna RW 03. Keberadaan akun tersebut menjadi sarana promosi bersama bagi pelaku UMKM di wilayah RW 03. Penguatan pemasaran melalui strategi digital dapat mendukung peningkatan visibilitas produk dan akses pasar UMKM (Fatimah et al., 2025; Firmansyah et al., 2025).

Dengan demikian, pendampingan pemasaran produk berbasis ABCD yang melibatkan kolaborasi antara mahasiswa KKN dan Karang Taruna telah memfasilitasi pengenalan strategi pemasaran yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi. Pendekatan pemasaran kolektif melalui akun media sosial "UMKM Sidosermo RW 03" menjadi salah satu upaya untuk memperkuat kerja sama antar pelaku UMKM sekaligus mendukung kegiatan promosi. Keterlibatan Karang Taruna sebagai aset komunitas yang memiliki kapasitas digital menjadi salah satu unsur pendukung pelaksanaan program ini, sebagaimana ditunjukkan pula dalam program pendampingan UMKM berbasis Karang Taruna di wilayah lain (Ainiyah et al., 2026).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kegiatan pendampingan legalitas usaha dan pemasaran produk berbasis *Asset-Based Community Development* (ABCD) bagi UMKM di RW 03 Kelurahan Sidosermo, Surabaya, dapat disimpulkan bahwa kegiatan pendampingan telah dilaksanakan melalui empat tahapan ABCD, yaitu *discovery*, *dream*, *design*, dan *destiny*. Pada tahap *discovery*, diidentifikasi bahwa pelaku UMKM masih menghadapi kendala dalam pengurusan legalitas usaha berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Perizinan Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), serta dalam pemasaran produk. Tahap *dream* digunakan untuk merumuskan kebutuhan dan solusi pendampingan, tahap *design* untuk menyusun program sosialisasi dan pelatihan, sedangkan tahap *destiny* untuk melaksanakan program melalui kolaborasi dengan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan (Dinkop UKM dan Perdagangan) Kota Surabaya dan Karang Taruna RW 03.

Hasil pendampingan legalitas usaha menunjukkan bahwa dari 16 pelaku UMKM peserta kegiatan, sebanyak 14 pelaku usaha telah difasilitasi dalam proses pendaftaran NIB, sedangkan 10 pelaku UMKM sedang dalam proses melengkapi berkas pengurusan PIRT. Capaian tersebut didukung oleh

TRADISI
e-ISSN: 3164 - 8037
How to Cite:
Multazami, M., Auliya, R. P., Subakri, T. A. A., Alfitrah, A. D., Prasetya, N. D., & Rofiq, A. A. (2026). Pendampingan NIB, PIRT, dan pemasaran berbasis ABCD untuk meningkatkan daya saing UMKM di RW 03 Sidosermo Surabaya. *TRADISI: Terapan Administrasi dan Aksi Pemberdayaan Inklusif, 1*(2), 25–40.

peran Bapak Khafid Basri selaku narasumber dari Dinkop UKM dan Perdagangan Kota Surabaya, serta keterlibatan mahasiswa dan Karang Taruna dalam pendampingan teknis. Sementara itu, pada aspek pemasaran, kegiatan ini menghasilkan akun media sosial bersama bernama "UMKM Sidosermo RW 03" pada platform Instagram dan TikTok yang dikelola oleh Karang Taruna. Kegiatan juga memberikan pengenalan mengenai desain kemasan dan strategi pemasaran digital sebagai upaya mendukung promosi produk UMKM.

Kontribusi pendekatan ABCD dalam kegiatan ini terlihat melalui pemanfaatan aset komunitas, seperti dukungan pengurus RW dan RT, peran Karang Taruna yang memiliki literasi digital, serta kolaborasi dengan dinas terkait. Pemanfaatan aset tersebut mendukung partisipasi masyarakat dan keterlibatan komunitas dalam pelaksanaan program. Untuk keberlanjutan kegiatan, diperlukan pendampingan lanjutan bagi pelaku UMKM yang masih dalam proses pengurusan PIRT, perluasan akses pemasaran melalui platform *marketplace*, serta penguatan kapasitas Karang Taruna sebagai pengelola media sosial UMKM. Selain itu, kolaborasi dengan pemerintah daerah dan institusi pendidikan perlu terus dikembangkan untuk mendukung penguatan UMKM di RW 03 Sidosermo.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Kota Surabaya, khususnya Bapak Khafid Basri, yang telah menjadi narasumber dan memberikan pendampingan teknis dalam pengurusan NIB dan PIRT. Terima kasih juga disampaikan kepada Ketua RW 03, Bapak Mat Tolchi Wibowo, Ketua RT 03, Bapak Ribut Santoso, serta seluruh pengurus RT di RW 03 Kelurahan Sidosermo atas dukungan dan kesediaannya menjadi narasumber wawancara. Ucapan terima kasih selanjutnya disampaikan kepada Karang Taruna RW 03 atas kerja sama dalam pelaksanaan FGD dan pengelolaan media sosial bersama, serta kepada seluruh pelaku UMKM RW 03 Sidosermo yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini.

REFERENSI

Abas, S., Waluya, C., & Latif, A. A. (2024). Penguatan potensi lokal untuk pengembangan UMKM kerupuk Pareredan melalui pendekatan ABCD (Asset Based Community Development) di Desa Silebu Kuningan Jawa Barat. *Etos: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 6*(2), 68–78. https://doi.org/10.47453/etos.v6i02.2956

Ainiyah, R., Saputra, M. A., & Safitri, E. R. W. (2025). Pemberdayaan masyarakat desa hutan melalui pendampingan digitalisasi produk UMKM. *Jurnal Pengabdian dan Peningkatan Mutu Masyarakat, 7*(1), 25–37. https://doi.org/10.22219/janayu.v7i1.42083

Asbara, N. W., Rizal, F., Mubyl, M., Hernawan, H., Mujaddid, M., & Fahrullah, M. (2025). MSME transformation through modern entrepreneurship strategies: An asset-based community development approach. *Community Empowerment, 10*(11), 2213–2223. https://doi.org/10.31603/ce.15106

TRADISI
e-ISSN: 3164 - 8037

How to Cite:
Multazami, M., Auliya, R. P., Subakri, T. A. A., Alfitrah, A. D., Prasetya, N. D., & Rofiq, A. A. (2026). Pendampingan NIB, PIRT, dan pemasaran berbasis ABCD untuk meningkatkan daya saing UMKM di RW 03 Sidosermo Surabaya. *TRADISI: Terapan Administrasi dan Aksi Pemberdayaan Inklusif, 1*(2), 25–40.

Wajdi, M. B. N., Sa'adillah, R., Ekaningsih, L. A. F., Rizal, H. S., & Fathurrohman, A. (2024). Asset-based community development: Leveraging local strengths for empowering communities: A bibliographic analysis. *Engagement: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 8*(1), 308–325. https://doi.org/10.29062/engagement.v8i1.1784

Darmawan, D. (2026). Kontribusi UMKM terhadap penyerapan tenaga kerja dan stabilitas ekonomi Indonesia. *CURVE: Journal of Economic, Business and Accounting, 2*(1), 9–16. https://doi.org/10.66596/dydecr47

Fatimah, F., Rusdiyanto, R., Rahayu, J., & Sumowo, S. (2025). Pengembangan UMKM melalui strategi pemasaran dan penguatan legalitas usaha (NIB, PIRT, halal). *Jurnal Pengabdian Masyarakat Manage, 6*(1), 75–82. https://doi.org/10.32528/manage.v6i1.2753

Fatwa, B. H., & Rasid, R. (2023). Peran Karang Taruna dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendampingan UMKM (Studi kasus Karang Taruna Mahakarya Desa Sukamaju Sukabumi). *Jurnal Kommunity Online, 3*(1), 53–66. https://doi.org/10.15408/jko.v3i1.30921

Firmansyah, E. A., Yusuf, U., Pratama, V. A. W., Fahmi, Z., & Hidayanti, A. N. (2025). Penguatan kapasitas UMKM melalui pendampingan legalitas usaha dan digital marketing. *Muria Jurnal Layanan Masyarakat, 7*(2), 126–132. https://doi.org/10.24176/mjlm.v7i2.15976

Hakim, M. I., Rasmiaty, M., Dewi, C., Saefuloh, S., Amelia, F., Novitasari, N., Rowandita, D. A., & Nugroho, I. S. (2024). Pembinaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) MOTEKAR: Pendataan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan pemasaran digital untuk penguatan legalitas dan akses pasar untuk mencapai UMKM mandiri dan tangguh. *JURPIKAT (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat), 5*(4), 1606–1617. https://doi.org/10.37339/jurpikat.v5i4.2302

Jeremi, M., Oktafia, R., & Nisa, F. L. (2025). Pengembangan UMKM menuju naik kelas melalui pendampingan legalitas di Kelurahan Menur Pumpungan. *Jurnal Abdimas Ilmiah Citra Bakti, 6*(2), 452–465.

Kaplele, F., Pondayar, Y., Mambaya, M., & Tanati, D. (2026). Penguatan kepatuhan hukum UMKM melalui edukasi NIB, PIRT, dan sertifikasi halal. *Jurnal Pengabdian UMKM, 5*(1), 17–21. https://doi.org/10.36448/jpu.v5i1.108

Nadapdap, B. J., & Jamaluddin, A. (2026). Kebijakan politik hukum pemberdayaan UMKM dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Depok. *Jurnal Hukum Lex Generalis, 6*(10). https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i10.3250

Puspaningrum, & Widiastuti. (2025). Pendampingan pengurusan legalitas usaha sebagai upaya menjamin keberlanjutan usaha mikro. *KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 6*(2), 167–180. https://doi.org/10.26623/tntzkx70

Purwito, L., Sucipto, S., Zulkarnain, Z., & Widyaswari, M. (2024). Pengembangan UMKM melalui program inkubasi wirausaha bagi pemuda Karang Taruna di Kabupaten Malang. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 5*(5), 10207–10215. https://doi.org/10.31004/cdj.v5i5.33798

Puspitasari, D., Burhanudin, H., Amaliah, L., Fauziah, Y., & Ardhiansyah, A. (2025). Pendampingan UMKM dalam aspek legalitas, branding, dan pemasaran sebagai upaya untuk meningkatkan

TRADISI
e-ISSN: 3164 - 8037

How to Cite:
Multazami, M., Auliya, R. P., Subakri, T. A. A., Alfitrah, A. D., Prasetya, N. D., & Rofiq, A. A. (2026). Pendampingan NIB, PIRT, dan pemasaran berbasis ABCD untuk meningkatkan daya saing UMKM di RW 03 Sidosermo Surabaya. *TRADISI: Terapan Administrasi dan Aksi Pemberdayaan Inklusif, 1*(2), 25–40.

ekonomi masyarakat Desa Bugel. *Jurnal Abdimas Indonesia, 5*(4), 2379–2385. https://doi.org/10.34697/jai.v5i4.2161

Rahmadany, K. M., Khumaidah, U., Trifiana, I., Rahmadani, M. S., Dannil, M., & Shobikin, S. (2025). Analisis penerapan digital marketing pada UMKM puding dalam upaya meningkatkan penjualan di Surabaya. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, 4*(4), 6613–6619. https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.4550

Saputra, S. R., Basori, D. S. N. P., Nuroaena, N., Farkhria, I. N., Miftahul'ulum, R., Wardani, I. Y., Kautsarmesya, A., Putri, S. A., Habibie, K., Astanti, A. D., Sari, D. R., Ormat, O., Wahyudin, W., & Ayunissa, D. L. (2025). Pemberdayaan UMKM melalui fasilitas legalitas usaha di Desa Bajing, Kroya: Implementasi program pendampingan NIB, P-IRT, dan sertifikat halal. *Linggamas: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 3*(1), 64–75. https://doi.org/10.20884/1.linggamas.2025.3.1.17401

Susilawaty, A., Nurdiyanah, N., & Aryadin, A. (2018). Identifikasi aset sarana sanitasi dasar dengan pendekatan asset-based community development (ABCD) di Desa Barugaia Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar. *Al-Sihah: The Public Health Science Journal, 10*(1), 96–107. https://doi.org/10.24252/as.v10i1.5423

Ubaidillah, M., Hazizi, S., Warahmah, M., & Birata, A. A. H. D. (2025). Pendekatan asset-based community development (ABCD) dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Labuhan Kertasari Sumbawa Barat. *Development: Journal of Community Engagement, 4*(4), 717–729. https://doi.org/10.46773/djce.v4i4.2860

How to Cite:
Multazami, M., Auliya, R. P., Subakri, T. A. A., Alfitrah, A. D., Prasetya, N. D., & Rofiq, A. A. (2026). Pendampingan NIB, PIRT, dan pemasaran berbasis ABCD untuk meningkatkan daya saing UMKM di RW 03 Sidosermo Surabaya. *TRADISI: Terapan Administrasi dan Aksi Pemberdayaan Inklusif, 1*(2), 25–40.